JSPH
Jurnal Sosial Politik Humaniora

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024
E-ISSN : XXXX-XXXX
DOI : 10.XXXXX/XXXXXX

Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy

Ema Srimulyani[1], Siti Nurhanisyah[2], Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum, Tasikmalaya
emasrimulyani@student.stiabiru.ac.id[1] , sitinurhanisyah@student.stiabiru.ac.id[2] ,
muhammadmufti@stiabiru.ac.id[3]

Diserahkan tanggal 08 Januari 2025| Diterima tanggal 08 Januari 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Januari 2025

Abstract:
This study examines a comparison between the Islamic governance system and modern democracy, highlighting their fundamental principles, governance structures, and implementation in state affairs. The Islamic governance system is based on the Qur'an and Sunnah, emphasizing justice, consultation (shura), and trustworthy leadership, while modern democracy is founded on popular sovereignty, individual freedom, and the rule of law. A key difference lies in the source of power legitimacy: in Islam, legitimacy stems from divine revelation and Sharia law, whereas in modern democracy, it derives from the people's will, expressed through electoral mechanisms. Nevertheless, both systems share commonalities, such as prioritizing public participation and striving for social justice. This study also explores how these systems are applied in various countries, encompassing both theocratic governments and secular democracies. The findings reveal that Islamic values can be integrated into the framework of modern democracy to establish more inclusive, ethical, and contextually relevant governance. This research aims to provide valuable insights into the relationship between Islam and democracy while inspiring the development of governance systems that are more just and aligned with contemporary global challenges.

Keywords: *Islamic Governance System; Modern Democracy; Justice, and Consultation*

Abstrak *:*
Tulisan ini membahas perbandingan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, dan implementasinya dalam kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, musyawarah (syura), dan kepemimpinan yang amanah, sementara demokrasi modern berlandaskan pada kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Salah satu perbedaan mendasar antara keduanya adalah sumber legitimasi kekuasaan; dalam Islam, legitimasi berasal dari wahyu ilahi dan hukum syariah, sedangkan dalam demokrasi modern, legitimasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilu. Meski demikian, terdapat kesamaan dalam hal partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dan tujuan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana kedua sistem ini diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut bentuk pemerintahan teokrasi maupun demokrasi sekuler. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi modern untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, etis, dan sesuai dengan konteks kontemporer. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi serta menginspirasi pengembangan tata kelola yang lebih adil dan relevan di dunia global saat ini

Kata Kunci: *Sistem Pemerintahan Islam; Demokrasi Modern; Keadilan dan Musyawarah*

Copyright © 2025, Author
This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari keduanya, struktur pemerintahan, serta implementasinya dalam praktik kehidupan bernegara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana dua sistem pemerintahan yang berbeda dapat beradaptasi dan berfungsi di dunia modern. Salah satu permasalahan yang diteliti adalah bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah (syura), dan kepemimpinan yang amanah, dapat berintegrasi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menekankan kedaulatan rakyat dan kebebasan individu. Penelitian ini penting karena memberikan perspektif baru mengenai potensi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih etis dan inklusif, serta relevansinya dengan tantangan politik saat ini (Hawi, 2019).

Terkait studi pustaka, berbagai kajian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Islam dan demokrasi. Penelitian oleh Nasr (2005) misalnya, menyoroti ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi dan ajaran Islam, sementara Rahman (2009) meneliti kemungkinan integrasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan demokratis. Selain itu, studi oleh Huntington (1993) tentang "clash of civilizations" juga memberikan perspektif mengenai perbedaan budaya dan sistem pemerintahan di dunia Islam dan Barat. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada upaya mengidentifikasi kesamaan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam demokrasi modern, bukan hanya pada perbedaan atau konflik antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan teori Teori Demokrasi Partisipatif yang mengedepankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta Teori Keadilan Sosial yang menekankan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis kesamaan antara sistem Islam dan demokrasi dalam mengutamakan keadilan sosial dan partisipasi Masyarakat (Kartono & Nurcholis, 2016).

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dapat bersinergi, terutama dalam menghadapi tantangan global terkait tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan. Dengan memadukan kedua sistem ini, penelitian ini berpotensi memberikan solusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan di dunia yang semakin pluralistik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menggali secara mendalam prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, dan penerapan kedua sistem tersebut dalam konteks yang lebih luas, bukan untuk menghasilkan data numerik. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dalam aspek-aspek tertentu seperti keadilan sosial, musyawarah, dan partisipasi publik (Sagena et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup tinjauan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Data sekunder ini menjadi sumber utama untuk memahami teori-teori yang ada terkait sistem pemerintahan Islam, prinsip-prinsip demokrasi, dan aplikasi keduanya dalam pemerintahan di berbagai negara. Selain itu, serta dokumen-dokumen hukum dan konstitusi negara-negara demokratis, juga digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik dan prinsip-prinsip kedua sistem pemerintahan (Wibowo, 2021).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan berbagai konsep dan nilai yang ada dalam kedua sistem tersebut, untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi antara keduanya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua sistem ini dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih etis dan inklusif di dunia kontemporer (Muhajirin & others, 2018).

PEMBAHASAN

Berbagai tokoh pemikir Islam memiliki pandangan berbeda terkait dengan konsep demokrasi, baik dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Islam maupun relevansinya dalam dunia modern. Yusuf al-Qardawi, seorang ulama terkemuka, berpendapat bahwa demokrasi dapat diterima dalam Islam selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijunjung tinggi. Ia menganggap demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang pada dasarnya sesuai dengan prinsip musyawarah (syura) dalam Islam. Namun, al-Qardawi menekankan bahwa demokrasi harus selalu berlandaskan pada hukum Allah, dan segala keputusan politik harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan agama (Pahri, 2017).

Sayyid Qutb, pemikir dan aktivis Ikhwanul Muslimin, memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap demokrasi Barat. Dalam karyanya Ma'alim fi al-Tariq, Qutb berpendapat bahwa demokrasi yang diterapkan di dunia Barat bersifat sekuler dan jauh dari nilai-nilai Islam, karena mengabaikan peran Tuhan dalam pengaturan kehidupan sosial dan politik. Menurutnya, demokrasi yang sahih adalah sistem yang didasarkan pada hukum Allah, yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat, bukan pada kehendak manusia yang terbatas. Qutb berargumentasi bahwa sistem politik yang ideal adalah yang sepenuhnya mengimplementasikan

syariah, dan bukan sistem yang didasarkan pada suara mayoritas rakyat yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama (Munawir, 2011).

Sementara itu, Nurcholish Madjid, seorang intelektual Muslim Indonesia, memberikan pandangan yang lebih moderat mengenai demokrasi. Ia percaya bahwa Islam tidak menentang demokrasi, melainkan mendukung bentuk pemerintahan yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Nurcholish, demokrasi dalam Islam bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang menghormati kebebasan individu, toleransi, dan keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam universal, seperti persamaan hak, keadilan sosial, dan musyawarah, yang dapat mengakomodasi keberagaman dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat (Majid, 2008).

Syaikh Ramadhan al-Buthi, seorang ulama dan pemikir asal Syria, memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap demokrasi modern, terutama yang diterapkan di negara-negara sekuler. Al-Buthi menilai bahwa demokrasi Barat, yang mengedepankan kedaulatan rakyat tanpa landasan agama, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, ia juga mengakui adanya kesamaan antara beberapa prinsip demokrasi, seperti musyawarah dan partisipasi politik, dengan ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa Islam dapat memberikan alternatif yang lebih baik, di mana demokrasi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama, sehingga menghasilkan pemerintahan yang tidak hanya adil, tetapi juga etis dan sesuai dengan hukum Tuhan (Maulana, n.d.).

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pandangan di antara para tokoh ini, mereka sepakat bahwa demokrasi harus diukur dengan standar moral dan etika Islam. Beberapa di antaranya mendukung integrasi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam, sementara yang lain lebih menekankan pada perlunya penerapan syariah sebagai dasar pemerintahan yang sah.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Pemerintahan Islam dan Demokrasi Modern

Sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern masing-masing memiliki prinsip-prinsip dasar yang membentuk fondasi pemerintahan dan pengelolaan negara. Meskipun keduanya berbeda dalam hal asal-usul, sumber legitimasi, dan implementasinya, kedua sistem ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan negara yang berdasarkan pada prinsip moral yang tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang mendasari masing-masing sistem, serta bagaimana keduanya bisa saling berinteraksi dan beradaptasi dalam dunia kontemporer (Ridwan et al., 2020).

Prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam pertama-tama berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip utama dalam sistem ini adalah keadilan (al-‘adl), yang merupakan nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan dalam pemerintahan Islam berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan hak-hak dasar setiap orang. Dalam kerangka ini, pemimpin atau pemerintah dianggap seb agai wakil Tuhan yang harus menegakkan hukum Allah di bumi dengan adil (Yad, 2022).

Oleh karena itu, pemimpin Islam harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip lain yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam adalah musyawarah (syura), yang menekankan pentingnya proses konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Syura dalam Islam bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip syura bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti majelis konsultatif atau lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan masyarakat (Asmara et al., 2022).

Sementara itu, sistem pemerintahan demokrasi modern mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignty), yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan pemerintah bertindak sebagai wakil rakyat yang diberi mandat melalui pemilu. Kedaulatan rakyat ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Prinsip utama dalam demokrasi modern adalah keadilan sosial dan persamaan hak, yang berarti setiap individu, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, memiliki hak yang setara dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial (Aulia, 2024).

Demokrasi modern juga menekankan pentingnya kebebasan individu, yang memberi ruang bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa takut akan pembalasan dari negara. Prinsip-prinsip kebebasan ini menjadi dasar dari sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati perbedaan. Selain itu, demokrasi modern menekankan supremasi hukum (rule of law), yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara. Hukum berlaku secara adil dan konsisten untuk seluruh warga negara, tanpa diskriminasi (Oktaviani, 2024).

Meskipun keduanya memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda, terdapat beberapa kesamaan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern, terutama dalam hal tujuan pemerintahan. Kedua sistem ini mengutamakan keadilan sosial sebagai nilai sentral dalam pemerintahan. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup pembagian kekayaan dan sumber daya secara adil, tetapi juga mencakup perlakuan yang setara di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Demikian pula, dalam demokrasi modern, keadilan sosial diutamakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi (Hanafi, 2013).

Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam kedua sistem ini. Dalam Islam, musyawarah dan konsultasi merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Demikian pula, dalam demokrasi modern, hak suara setiap individu dalam pemilu dan keterlibatan mereka dalam diskursus politik menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Khalimatusyaadah, 2024).

Namun, perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada sumber legitimasi kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan dianggap sah jika pemimpin menjalankan tugasnya berdasarkan wahyu ilahi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pemimpin dalam Islam, seperti khalifah atau imam, dipandang sebagai wakil Tuhan yang diberi amanah untuk memimpin umat. Sementara itu, dalam demokrasi modern, legitimasi kekuasaan berasal dari kehendak rakyat, yang memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Pemimpin dalam demokrasi modern tidak dianggap sebagai wakil Tuhan, tetapi sebagai perwakilan rakyat yang diberikan mandat untuk menjalankan tugas pemerintahan selama periode tertentu (Nurhadi & Dalimunthe, 2020).

Kesimpulannya, meskipun sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda, keduanya berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, musyawarah, dan partisipasi masyarakat dapat dijadikan jembatan untuk memahami bagaimana kedua sistem ini dapat saling melengkapi dan beradaptasi dalam konteks dunia yang semakin plural dan kompleks. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan fundamental, kedua sistem ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan adil di masa depan.

Perbandingan Sumber Legitimasi Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Islam dan Demokrasi Modern

Sumber legitimasi kekuasaan merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Dalam konteks pemerintahan Islam, legitimasi kekuasaan bersumber dari wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan di dunia ini merupakan amanah dari Tuhan, yang diberikan kepada pemimpin untuk menegakkan hukum Allah di bumi. Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam, baik itu khalifah atau imam, dianggap sebagai wakil Tuhan yang harus menjalankan tugasnya dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ernawati et al., 2024).

Legitimasi kekuasaan ini tidak didasarkan pada pilihan rakyat, tetapi pada pemenuhan kewajiban moral dan agama yang diatur dalam hukum syariah. Oleh karena itu, pemimpin dalam Islam harus menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan ini, penguasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati, karena tugasnya adalah menjaga kepentingan umat serta menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan Tuhan (Panggabean & Harahap, 2024).

Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan demokrasi modern, sumber legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Demokrasi modern menekankan prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignty), yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan pemimpin yang memerintah merupakan wakil yang diberi mandat oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan diberikan kepada pemerintah hanya apabila mereka memperoleh dukungan mayoritas rakyat, biasanya melalui suara dalam pemilu yang bebas dan adil (Bustomi, 2023).

Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam demokrasi bergantung pada proses demokratis yang melibatkan hak pilih individu. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin, yang menjadikan mereka memiliki suara dalam menentukan arah

kebijakan dan keputusan negara. Pemimpin dalam demokrasi tidak dianggap sebagai wakil Tuhan atau penguasa yang memiliki otoritas ilahi, tetapi sebagai perwakilan rakyat yang memegang mandat sementara dan dapat digantikan melalui proses demokratis, seperti pemilu. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada sumber kewenangan yang memberikan legitimasi (Nabila et al., 2020).

Dalam Islam, kewenangan pemimpin berasal dari Tuhan, sehingga pemerintahan Islam dapat disebut sebagai teokrasi, di mana penguasa dianggap bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi. Tugas pemimpin Islam adalah menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Tuhan, yang tercermin dalam ajaran agama. Dalam hal ini, otoritas politik dan agama saling berhubungan erat, dan penguasa tidak hanya memerintah secara politis, tetapi juga dalam kerangka spiritual yang mendalam. Ini berbeda dengan demokrasi modern, di mana otoritas politik lebih didasarkan pada pemilihan rakyat dan supremasi hukum, di mana pemimpin berfungsi sebagai pengelola negara yang dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat, tanpa adanya kaitan langsung dengan otoritas agama (Munfaridah, 2016).

Namun, meskipun ada perbedaan signifikan dalam sumber legitimasi, kedua sistem ini memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Misalnya, kedua sistem mengakui pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan. Dalam Islam, pemimpin dianggap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan umat, serta menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ajaran agama. Dalam demokrasi, meskipun sumber legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat, tujuan utama pemerintah tetap memastikan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menjamin hak-hak dasar, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, meskipun mekanisme legitimasi berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Masyarakat (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

Selain itu, meskipun dalam demokrasi modern kekuasaan berasal dari rakyat, bukan berarti demokrasi sepenuhnya bebas dari pengaruh agama. Di beberapa negara, seperti negara-negara dengan mayoritas Muslim, nilai-nilai agama masih mempengaruhi kebijakan publik, meskipun secara formal negara tidak menyatakan dirinya sebagai negara agama. Integrasi antara prinsip-prinsip agama dengan sistem demokrasi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern bersifat sekuler, dalam praktiknya, banyak negara yang berusaha menyelaraskan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya (Abdillah, 2015).

Secara keseluruhan, meskipun sumber legitimasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern sangat berbeda, keduanya mencerminkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah ilahi yang harus dijalankan sesuai dengan hukum Allah, sementara dalam demokrasi modern, kekuasaan adalah hak rakyat yang diberikan kepada pemimpin untuk menjalankan tugas dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam melihat hubungan antara agama, politik, dan masyarakat, serta cara-cara pemerintahan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda (Yusa et al., 2024).

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kerangka Demokrasi Modern

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi modern merupakan topik yang menarik dan relevan dalam diskursus politik kontemporer. Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem ini, yaitu bahwa Islam didasarkan pada wahyu ilahi sementara demokrasi berlandaskan pada kehendak rakyat, terdapat potensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik pemerintahan demokratis. Nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, musyawarah (syura), dan kesejahteraan sosial dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan transparan dalam sistem demokrasi modern. Dengan demikian, integrasi ini tidak berarti menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi lebih kepada memperkaya sistem demokrasi dengan nilai-nilai yang sejalan dengan moralitas dan etika Islam (Bagir, 2005).

Salah satu nilai utama dalam Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka demokrasi adalah keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek sosial-ekonomi, tetapi juga perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam demokrasi, meskipun ada sistem hukum yang menjamin keadilan, prinsip keadilan sosial dalam Islam dapat memberikan perspektif tambahan untuk memastikan bahwa kebijakan publik memperhatikan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial Islam dapat diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih pro-rakyat dan mengutamakan pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan pengentasan ketimpangan sosial (Fachruddin, 2006).

Prinsip musyawarah (syura) dalam Islam juga dapat menjadi nilai yang sangat relevan dalam sistem demokrasi modern. Musyawarah, yang berarti konsultasi atau diskusi bersama, merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan Islam. Dalam Islam, setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin harus melalui proses musyawarah dengan umat atau perwakilan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga legislatif yang melibatkan berbagai perwakilan masyarakat untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan bersama. Oleh karena itu, meskipun demokrasi modern telah memiliki mekanisme pemilu dan partisipasi politik yang luas, prinsip syura dapat menguatkan sistem ini dengan menambah dimensi konsultatif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan lebih menyeluruh (Efendi, 2024).

Kepemimpinan yang amanah juga merupakan nilai penting dalam Islam yang relevan untuk diterapkan dalam konteks demokrasi modern. Dalam Islam, pemimpin diharapkan untuk memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang amanah tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, tetapi juga kepada Tuhan atas kebijakan yang diambil. Nilai amanah ini dapat memperkuat kualitas kepemimpinan dalam demokrasi modern dengan mendorong para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi, serta tidak terjebak dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka demokrasi, pemimpin

yang amanah akan lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab (Haris & Sapari, 2024).

Lebih jauh lagi, nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Islam juga dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang mempromosikan harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat meskipun ada perbedaan, baik dalam hal agama, suku, maupun budaya. Dalam demokrasi modern, nilai ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan nilai persatuan ini dalam kebijakan negara dapat mengurangi konflik sosial dan memperkuat kohesi sosial, khususnya di negara-negara yang memiliki masyarakat multikultural dan multireligius (Haris & Sapari, 2024).

Namun, integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi modern tentu tidak berarti bahwa Islam menggantikan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kerangka yang mendukung kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pluralisme yang menjadi ciri khas demokrasi modern. Dengan demikian, integrasi ini dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih holistik, yang menggabungkan prinsip-prinsip moral Islam dengan mekanisme politik demokratis. Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menciptakan model pemerintahan yang tidak hanya adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak individu dan kebebasan, sesuai dengan nilai-nilai universal yang diterima dalam masyarakat global saat ini.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar-dasar pemikiran antara Islam dan demokrasi modern, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi modern memberikan peluang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih etis, inklusif, dan adil. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, musyawarah, kepemimpinan yang amanah, dan persatuan, kedua sistem ini dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

SIMPULAN

Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar, sumber legitimasi kekuasaan, dan potensi integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi modern. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua sistem ini memiliki perbedaan yang mendasar—terutama dalam hal sumber legitimasi kekuasaan, di mana Islam berlandaskan pada wahyu ilahi dan demokrasi pada kehendak rakyat—kedua sistem ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab. Sistem pemerintahan Islam menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah (syura), dan kepemimpinan yang amanah, sementara demokrasi modern lebih mengutamakan kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan supremasi hukum.

Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme pemerintahan, prinsip-prinsip dalam Islam, seperti keadilan sosial dan musyawarah, dapat diintegrasikan dalam kerangka demokrasi

modern untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan persatuan dapat memperkaya prinsip-prinsip demokrasi dengan memberikan perspektif moral yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi yang mengarah pada pemerintahan yang lebih adil dan etis dalam konteks global kontemporer.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara Islam dan demokrasi dalam konteks sistem pemerintahan, serta mengungkap potensi adaptasi nilai-nilai Islam dalam pemerintahan demokratis. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori politik yang lebih inklusif dan etis. Sebagai saran untuk peneliti lain, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam menggali penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan di berbagai negara dengan mayoritas Muslim dan melihat bagaimana nilai-nilai ini dapat berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi modern dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. (2015). Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993. Prenada Media.

Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 18–43.

Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara Vol, 6(02).

Aulia, E. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH. Universitas Andalas.

Bagir, Z. A. (2005). Integrasi ilmu dan agama: interpretasi dan aksi. Mizan Pustaka.

Bustomi, I. (2023). PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, 1(3), 6–15.

Efendi, S. (2024). Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research, 3(1), 69–78.

Ernawati, E., Bahar, S., & Kurniati, K. (2024). Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2(5), 264–275.

Fachruddin, F. (2006). Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pustaka Alvabet.

Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1(2), 95778.

Haris, M. A., & Sapari, S. (2024). Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 6(2), 164–172.

Hawi, A. (2019). Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 15(1), 108–133.

Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Khalimatusyaadah, K. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tahun anggaran 2023 di kota Cimahi menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Majid, N. (2008). Islam, kemodernan, dan keindonesiaan. Mizan Pustaka.

Maulana, L. (n.d.). KEPEMIMPINAN DAN HAK POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR﷿IYYAH (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhajirin, L., & others. (2018). KONSTRUKSI GAGASAN ISLAM LIBERAL (ANALISIS FRAMING SITUSWEB JARINGAN ISLAM LIBERAL﷿ISLAMLIB. COMPERIODE 2001-2016).

Munawir, M. F. (2011). Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb tentang Tafsir Jahiliyah bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer. Jurnal Dakwah, 12(1), 69–98.

Munfaridah, T. (2016). Kepemimpinan dalam islam. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 14(1).

Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. Notarius, 13(1), 138–153.

Nurhadi, N., & Dalimunthe, M. (2020). Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan Taqiyuddin Al-Nabhani dalam Perspektif Syiasyah Syar﷿iyyah. PALAPA, 8(2), 244–284.

Oktaviani, S. (2024). KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN: Kebebasan Perpendapat di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2(7), 174–186.

Pahri, R. (2017). Demokrasi; Pemilihan umum dan kriteria pemimpin perspektif yusuf al qaradhawi.

Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024). Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1), 1–15.

Ridwan, I. H. J., Sudrajat, M. H. A. S., & others. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.

Sagena, U., Lawelai, H., Dema, H., & others. (2023). Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wibowo, A. E. (2021). Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. Penerbit Insania.

Yad, P. F. (2022). Studi Komparatif Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Negara Hukum Indonesia. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Yusa, I. M. M., Riwayati, A., Aminah, S., & Qadar, J. (2024). Pengantar Ilmu Sosial.